

# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Selasa, 6 November 2018**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman Utama)	Selasa, 6 November 2018	Berita Foto	Jembatan Gantung di Padang Rusak.
2	Kompas (Halaman, 14)	Selasa, 6 November 2018	Berita Foto	Proyek Jalan Tol Pandaan – Malang yang sedang dikerjakan di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.
3	Kompas (Halaman, 14)	Selasa, 6 November 2018	Pembangunan Tetap Jadi Fokus	Kementerian PUPR memastikan program pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus pemerintah sampai 2019. Sekitar 84 persen dari anggaran sebesar Rp 110,7 triliun di APBN.
4	Kompas (Halaman, 18)	Selasa, 6 November 2018	Jalan Ambles, Akses Antarnagari	Hujan deres yang mengguyur kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat mengakibatkan jalan sepanjang 75 meter ambles di Jorong Tapian, Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus.
5	Kompas (Halaman, 22)	Selasa, 6 November 2018	Jabodetabek Krisis Sampah	Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sudah tegas mengatur untuk mengurangi dan memilah sampah. Namun, pelaksanaannya lemah. Kesadaran warga pun amat kurang.
6	Kompas (Halaman, 22)	Selasa, 6 November 2018	Tantangan Pengelolaan Saat Banjir Tiba	Metodereduce, reuse dan recycle serta bank sampah menjadi salah satu upaya mengelola sampah secara mandiri di Jakarta.
7	Kompas (Halaman, 22)	Selasa, 6 November 2018	Gerakan Massa Solusi Atasi Sampah	Sampah menjadi masalah seris bagi kota jika tidak dikelola dengan baik. Saat ini, sebenarnya semua warga kota di Jabodetabek telah merasakan dampak buruk itu. Butuh warga sendiri turun tangan untuk mengelola sampah agar sampah tak terus jadi masalah.
8	Koran Tempo (Halaman, 18)	Selasa, 6 November 2018	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Diperbanyak	Pemerintah kebanjiran usul dari pemerintah daerah yang mengajukan agar daerahnya dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Sudah ada tiga usul dari pemerintah daerah untuk mendaftar menjadi kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata.
9	Media Indonesia (Halaman, 14)	Selasa, 6 November 2018	Pemerintah tidak ingin wariskan proyek mangkrak.	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan seluruh proyek yang mulai dijalankan pada periode pemerintahan kabinet kerja akan selesai dikerjakan.
10	Media Indonesia (Halaman, 15)	Selasa, 6 November 2018	Berita Foto	Pengembangan Kawasan Pesisir Timur Jambi. Bangunan pertokoan dan rumah penduduk memadati kawasan pesisir timur Provinsi Jambi di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, pekan lalu.
11	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 6 November 2018	Target Lelang 14 Bendungan Meleset	Kementerian PUPR menyatakan target melelang 14 proyek bendungan pada tahun ini meleset seiring dengan pembatalan lelang Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur senilai Rp 550 miliar.
12	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 6 November 2018	Jembatan Batam-Bintan Telan Rp 11 Triliun	Perkiraan investasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 3 km melonjak menjadi Rp 11 triliun dalam dokumen perencanaan terbaru yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian PUPR.
13	Bisnis Indonesia (Halaman, 22)	Selasa, 6 November 2018	Babel Perjuangkan KEK Pariwisata	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menginginkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di tanjung gunung dan Sungailiat diubah peruntukannya dari tambang menjadi pariwisata.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Jembatan Gantung di Padang Rusak.		

### Jembatan Gantung di Padang Rusak



KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

**Warga membantu** pelajar melewati jembatan gantung yang rusak di Kelurahan Beringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (5/11/2018). Jembatan gantung tersebut rusak akibat dihantam luapan air sungai di bawahnya pada Jumat (2/11). Meski berbahaya, sejumlah warga tetap nekat melewati jembatan tersebut. Sementara warga lain memilih menggunakan jalur lain dengan waktu tempuh yang lebih lama, yakni sekitar 30 menit.

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Proyek Jalan Tol Pandaan – Malang yang sedang dikerjakan di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.		



KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

**Proyek** Jalan Tol Pandaan-Malang yang sedang dikerjakan di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (5/11/2018). Jalan tol tersebut merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans-Jawa yang pengerjaannya dibagi menjadi 5 seksi wilayah, yaitu Seksi 1 Pandaan-Purwodadi, Seksi 2 Purwodadi-Lawang, Seksi 3 Lawang-Singosari, Seksi 4 Singosari-Pakis, dan Seksi 5 Pakis-Malang.

Judul	<b>Pembangunan Tetap Jadi Fokus</b>	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Kementerian PUPR memastikan program pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus pemerintah sampai 2019. Sekitar 84 persen dari anggaran sebesar Rp 110,7 triliun di APBN.		

# Pembangunan Tetap Jadi Fokus

**JAKARTA, KOMPAS** — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan program pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus pemerintah sampai 2019. Sekitar 84 persen dari anggaran sebesar Rp 110,7 triliun di APBN 2019 akan digunakan sebagai belanja modal.

Meski demikian, pemerintah diharapkan mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan infrastruktur itu fasilitas untuk mendistribusikan uang ke daerah. Pada 2019, semua harus memastikan jangan ada proyek mangkrak, meski bukan berarti tidak harus selesai karena ada proyek tahun jamak," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Senin (5/11/2018), di Jakarta.

Pada 2019, Kementerian PUPR menyiapkan 3.900 paket proyek. Sebagian besar paket proyek ada di Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni 3.400 paket, senilai Rp 30 triliun.

Selain proyek tahunan, ada juga proyek tahun jamak seperti bendungan. Menurut rencana, tahun depan pemerintah akan mulai membangun 9 ben-

dungan dari program pembangunan 49 bendungan baru pada periode 2015-2019. Lelang dimulai bulan ini dan ditargetkan selesai Maret 2019.

Pada tahun anggaran 2019, Kementerian PUPR juga akan menerapkan pembiayaan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) perihal ketersediaan layanan dengan anggaran Rp 5,1 triliun. Skema baru itu akan diterapkan untuk preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) Rp 1,1 triliun, preservasi jalan Trans-Papua (Wamena-Mumugu) Rp 1,9 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utara Pulau Jawa Rp 0,8 triliun, serta preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp 1,2 triliun.

Basuki menambahkan, penggantian jembatan dengan skema ketersediaan layanan itu untuk mengganti jembatan lama bertipe Callender Hamilton yang kebanyakan dibangun pada 1970-an. Pelaksanaan pembangunan dilakukan 3 tahun dan pembayaran kepada badan usaha dilakukan mulai tahun keempat hingga tahun ke-15.

"Ini sudah mulai dilakukan tender. Ada yang menyatakan

minat. Sudah ada yang pra-kualifikasi lelang," ujar Basuki.

Proyek prioritas lain yang disiapkan adalah bendungan. Tahun ini, dari rencana membangun 14 bendungan, masih ada satu bendungan yang belum bisa dilelang, yakni Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemungkinan, pembangunan bendungan tersebut akan digeser menjadi tahun depan.

## Evaluasi

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat, komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia mesti diapresiasi. Pembuatan berbagai skema, baik penugasan maupun KPBU, dinilai sebagai terobosan positif.

Namun, tambah Enny, dampak pembangunan infrastruktur terhadap dunia usaha perlu dievaluasi. Dalam dua tahun terakhir, investasi masih bergerak di sektor primer dan tersier. Adapun sektor sekunder yang menjadi lokasi industri pengolahan atau manufaktur tidak terlihat dampaknya.

(NAD)

Judul	Jalan Ambles, Akses Antarnagari	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Hujan deras yang mengguyur kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat mengakibatkan jalan sepanjang 75 meter ambles di Jorong Tapian, Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus.		

## Jalan Ambles, Akses Antarnagari Terputus

**SIJUNJUNG, KOMPAS** — Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, mengakibatkan jalan sepanjang 75 meter ambles di Jorong Tapian, Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus. Tak ada korban jiwa, tetapi kejadian itu membuat akses lalu lintas antarnagari di kecamatan itu terputus.

Sekretaris Camat Sumpur Kudus Suardi ketika dihubungi dari Padang, Senin (5/11/2018) siang, mengatakan, hampir seluruh badan jalan ambles ke arah sungai, mengingat lubangnya yang cukup luas. Kepolisian Sektor Sumpur Kudus sudah memasang garis polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sejak hari ini, akses dari Nagari Kumanis ke nagari lain di Kecamatan Sumpur Kudus, yakni Nagari Mangganti, Silantai, Sisawah, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan, Tamparungo, Tanjuang Labuah, Tanjung Bonai Aur, Tanjung Bonai Aur Selatan, dan Unggan, terputus.

"Sementara ini, masyarakat yang ingin menuju Kumanis harus berputar dulu melewati daerah Lintau, Kabupaten Tanah Datar, dari Tanjung Bonai Aur. Konsekuensinya jarak tempuh lebih panjang, yakni sekitar 20 kilometer," jelas Suardi.

Jalan ambles terjadi Sabtu (3/11). Hujan terjadi Sabtu hingga Minggu, tetapi jalur itu masih bisa dilewati kendaraan roda dua. Senin pagi ini, kondisinya semakin besar dan tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat maupun roda dua," kata Suardi.

Suardi menambahkan, hujan lebat yang mengguyur Sijunjung sejak Jumat (2/11) hingga Sabtu membuat jalan ambles. Pada saat yang sama, bantaran Sungai Batang Sinamar yang berada di bawah jalan tersebut terkikis.

Senin pagi, Bupati Sijunjung, wali nagari, dan pemuka adat bertemu untuk membahas penanganan tanah ambles tersebut. "Disepakati akan ada pembuatan jalan baru, tetapi tidak di lokasi yang sama karena khawatir ambles lagi. Masyarakat juga bersedia menghibahkan lahannya," kata Suardi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sijunjung Hardiwan menambahkan, bencana ini membuat pemkab setempat menetapkan masa tanggap darurat selama dua minggu hingga 17 November 2018. "Pertimbangannya, dibutuhkan waktu dua minggu untuk membuat jalan baru. Kami pun segera membuat proposal dan mengajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jika disetujui, jalan baru akan dibuat. Itu pun baru jalan pengerasan. Pengaspalan nanti dilakukan oleh pemerintah kabupaten," kata Hardiwan.

Di Kota Padang, banjir melanda enam kecamatan, pekan lalu. Namun, sebagian besar masyarakat sudah kembali beraktivitas. Di beberapa lokasi, warga masih sibuk membersihkan rumah dan perabot rumah tangga. (ZAK)

Judul	Jabodetabek Krisis Sampah	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 22)		
Resume	Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sudah tegas mengatur untuk mengurangi dan memilah sampah. Namun, pelaksanaannya lemah. Kesadaran warga pun amat kurang.		

# Jabodetabek Krisis Sampah

Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sudah tegas mengatur untuk mengurangi dan memilah sampah. Namun, pelaksanaannya lemah. Kesadaran warga pun amat kurang.

**JAKARTA, KOMPAS** — Sebetulnya sudah ada gerakan-gerakan komunitas yang memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah atau tingkat keluarga yang tersebar di Jabodetabek. Gerakan itu di antaranya ada Lab'anya di Tangerang Selatan, Ibu Bank Sampah Karya Peduli di Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, juga ada Mat Peci di tepi Cilincing, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jika diurut, bisa puluhan komunitas di tiap kota di Jabodetabek.

Akan tetapi, gerakan komunitas ini model sudah bertangung bertahu-tahu belum juga bergeser secara luas. Dampaknya untuk skala kota, apalagi provinsi, belum signifikan.

Di Kabupaten Bekasi, misalnya, tumpukan sampah masih mengurung di Jalan Raya Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL), Senin (5/11/2018). Jalan Raya Kali CBL, membentang sepanjang 20 kilometer dari Kecamatan Sukawangi hingga Cikarang Utara. Memasuki kilometer 11, setelah melwati jembatan besar CBL, tumpukan sampah mulai terlihat di kanan dan kiri jalan.

Wilayah itu terdiri dari permukiman, peternakan ayam, dan beberapa pabrik. Setiap 100 meter selalu ada titik pembuangan sampah liar yang baru. Batu busuk pun menguar di sekitar tempat-tempat tersebut.

Adapun sampah terdiri dari berbagai jenis, mulai dari organik hingga plastik, baik yang dikemas maupun tidak. Sebagian besar sampah masih basah dan sebagian lainnya sudah dibakar.

Yayah (46), warga Desa Muktiwar, Kecamatan Cibitung, mengatakan, pemasangan tersebut sudah ada sejak delapan tahun lalu. Saat itu, ia yang baru pindah dari Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, kerap menemukan pengendaraan yang membuang sampah di tepi jalan. "Sampai sekarang, kebanyakan orang membuang sampah sambil lewat. Ada yang pakai motor, ada juga yang pakai mobil," ujarnya.

Tidak ada tempat pembuangan sementara dekat pusat kegiatan warga di CBL. Kilometer 11 tersebut, jarak menuju tempat pembuangan akhir Burangrang sekitar 23 kilometer.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam mengakui, masih ada pihak yang sembunyi-sembunyi membuang sampah di Jalan Raya Kali CBL. Mereka mengumpulkannya dari kompleks perumahan dan membawanya ke jalan.

Di Kota Bogor, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rita Banteng mengatakan, menjerat sistem

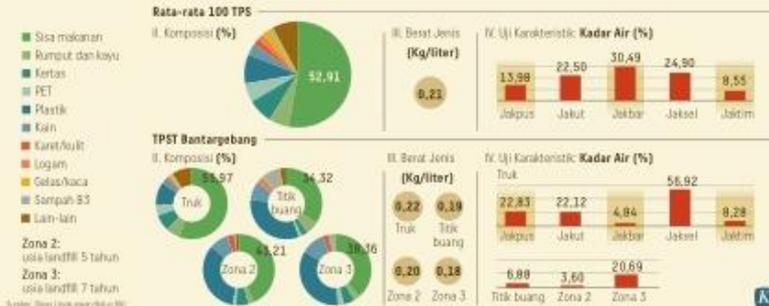


WILAYAH KOTA BOGOR

## Sampah di TPS dan TPST Bantargebang

Hasil kajian Pengukuran Timbulan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di TPS dan TPST Bantargebang Tahun 2017

I. Timbulan (rata-rata 100 TPS): 2,79 liter/orang/hari



pengolahan sampah tingkat kota yang masih menggunakan open dumpsite, hal ini karena tidak ada pemerintah daerah yang kini bisa melaksanakan penanganan sampah akhir dengan sistem sanitary land fill. Sebab, biasanya yang sangat mahal.

Meiki demikian, Kota Bogor

berupaya terus menggerakkan tempat pembuangan sementara sekaligus pusat reduce, reuse, dan recycle (3R). Juga menggandeng pusat belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Namun, Kota Bogor tetap berpepetan mengelola sampah. Produksi sampah masyarakat Bogor saat

ini 600 ton per hari dengan hitungan satu juta penduduk dikalikan 0,6 kilogram sampah yang dihasilkan per jiwa.

### Saling terkait

Pada hal, sampah di pembuangan terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk. Tahun

ini, volume harian sampah DKI Jakarta yang dibuang ke tempat pembuangan sampah terakhir (TPST) Bantargebang sekitar 7000-7500 ton per hari. Sekitar 14 persen atau 1000 ton per hari merupakan sampah plastik. Volume kantong plastik yang dihasilkan sekitar 9 persen atau 630

terurai, sedangkan plastik degradable membutuhkan sekitar 2-4 tahun untuk terurai.

Memurut Isnawa, pengurangan sampah DKI sebetulnya ditargetkan sekitar 18 persen per hari sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah. "Kalau warga bisa mengurangi sampah plastiknya saja, akan sangat membantu memperpanjang usia TPST Bantargebang, sementara pembangunan ITP-ITP berlangsung," katanya.

Dengan sedikit mengubah gaya hidup saja, setiap warga bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Seperti penggunaan tas belanja yang bisa dipakai ulang hingga membawa wadah minuman isi ulang sendiri sehingga mengurangi penggunaan minuman kemasan plastik.

Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Bahkan, dalam pasal 21 pada itu, sudah tegas diamanatkan pengelola toko modern, pusat perbelanjaan, dan pasar wajib menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Ancaman sanksi pun cukup tinggi, yaitu uang denda Rp 5 juta-Rp 25 juta bagi pemilik usaha yang tak mematuhi.

Namun, di lapangan, penggunaan kantong plastik belum terkendali. Di pasar tradisional, sekali belanja bisa menghasilkan 5-10 kantong plastik.

### Aturan belum eksplisit

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Rahmawati mengatakan, belum efektifnya perda itu salah satunya belum eksplisitnya aturan pengurangan sampah plastik. Selain itu, sosialisasi dan gawig dari peraturan soal sampah yang secara umum belum mencapai seluruh warga.

"Kami pernah survei ke 400 pengunjug di Hari Bebas Kendaraan Bermotor, ternyata belum sampai 50 persen warga tahu ada aturan setiap warga wajib mengurangi sampah di rumah," katanya.

Ketua Indonesia Solid Waste Association Sri Belasari mengatakan, undang-undang pengelolaan sampah dan aturan turunannya sebenarnya sudah tegas dan rinci. Namun, sosialisasinya yang masih kurang. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara luas dengan melibatkan ahli komunikasi, termasuk juga guru dan rumah ibadah.

"Sebetulnya yang terpenting soal sampah adalah menanamkan pemahaman setiap orang bertanggung jawab atas sampahnya masing-masing," katanya. (DJI/NIA/JOG/BTS/UT)

Judul	Tantangan Pengelolaan Saat Banjir Tiba	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 22)		
Resume	Metoderedu, reuse dan recycle serta bank sampah menjadi salah satu upaya mengelola sampah secara mandiri di Jakarta.		

## Tantangan Pengelolaan Saat Banjir Tiba

Terus bertambahnya timbulan sampah di DKI Jakarta menimbulkan tantangan dalam pengelolaan perkotaan. Pengelolaan sampah dibutuhkan tata kelola berbasis data untuk mengurai persoalan yang kerap menimbulkan ketegangan dengan Kota Bekasi terkait keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang sebagai lokasi pembuangan sampah warga Jakarta.

Data terkait pengolahan sampah penting untuk dimiliki dan disebarluaskan kepada publik. Apalagi dalam konteks perubahan pembangunan serta realisasi pemerintah dan warga dari sebelumnya administrator-penghuni, penyedia jasa-konsumen, dan fasilitator-partisipan menjadi kolaborator dan kokreator.

Sebagian data telah diunggah dalam laman data.jakarta.go.id yang merupakan portal data terpadu Pemerintah Provinsi DKI. Salah satu hasratnya agar masyarakat dapat memanfaatkan data untuk menciptakan inovasi dan peran serta membangun Jakarta.

Namun, tidak semuanya data terbaru. Data mengenai produksi sampah, misalnya, dari total 30 dataset dengan kata kunci "sampah", relatif hanya ada dua data terkait dari kondisi tahun 2011 dan 2014.

Data tahun 2011 yang berjudul "Data Jumlah Produksi Sampah Dan Terangkut Perhari Menurut Kota Adm DKI Jakarta" berisikan terkait sampah terangkut dan jumlah sisa sampah per hari. Produksi sampah di Jakarta Selatan pada tahun itu tercatat 742,81 ton dengan 739,96 ton terang-

### Metode reduce, reuse, dan recycle serta bank sampah menjadi salah satu upaya mengelola sampah secara mandiri di Jakarta.

kut dan sisanya 2,86 ton.

Di Jakarta Timur, produksi sampah 1487,23 ton, sebanyak 780,55 ton di Jakarta Pusat, dan 1503,94 ton di Jakarta Barat. Sementara Jakarta Utara menghasilkan 996,65 ton sampah per hari, dan 86,71 ton di wilayah pesisir dan pantai.

Hal ini berarti terdapat 5.597,87 ton sampah dihasilkan warga Jakarta setiap hari pada 2011. Jumlah tersebut meningkat pada 2014.

Berdasarkan portal sama berjudul "Data Jumlah Tonase Sampah Tahun 2014" diketahui sejumlah dimensi terkait sumber sampah dan tonase sampah yang dihasilkan per bulan. Akan tetapi, sumber produksi sampah tidak hanya berdasarkan lima wilayah Jakarta di bawah saku dinas kebersihan masing-masing, tetapi juga sejumlah elemen, seperti sampah pasar dan swasta umum.

Hal ini membuat data produksi sampah pada 2011 dan 2014 tidak bisa langsung di-handingkan begitu saja. Dataset 2014 tentang produksi sampah di Jakarta relatif hanya bisa dipergunakan untuk melihat detail kondisi tahun tersebut berdasarkan sumber produksi sampah dan besaran

produksi sampah per bulan.

Dari dataset tersebut terlihat sumber sampah dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat menempati porsi yang besar. Sementara sumber sampah dari Kendaraan Sewa Sarana Wilayah relatif kecil.

Pengolahan sampah dengan metode reduce, reuse, dan recycle (3R) serta bank sampah juga menjadi salah satu upaya mengelola sampah secara mandiri di Jakarta.

Fasilitas terkait kebutuhan itu sudah tersebar di Jakarta meskipun tidak semua fasilitas berstatus aktif.

Hal ini terlihat dalam dataset berjudul "Data Lokasi Reduce, Reuse Dan Recycle (3R) Dan Bank Sampah Tahun 2017". Fasilitas terbesar dimiliki Jakarta Timur dengan persentase 21,79 persen.

Jakarta Barat berada di peringkat kedua, yakni 21,47 persen dan Jakarta Utara 19,09 persen. Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yakni 18,88 persen dan 17,48 persen serta memiliki fasilitas yang berdekatan. Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki fasilitas paling sedikit, yakni 1,29 persen.

Dataset berjudul "Data Lokasi Saringan Sampah Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018" menunjukkan, 17 saringan dalam kondisi baik dari total 27 saringan.

Tidak ada data volume sampah pada titik saringan yang rusak. Akan tetapi, di saringan yang berfungsi baik seperti Saringan Spillway Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara, tercatat memiliki volume sampah terbesar, rata-rata 8 meter kubik per bulan.

(INGKI RINALDO)

Judul	<b>Gerakan Massa Solusi Atasi Sampah</b>	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 22)		
Resume	Sampah menjadi masalah serius bagi kota jika tidak dikelola dengan baik. Saat ini, sebenarnya semua warga kota di Jabodetabek telah merasakan dampak buruk itu. Butuh warga sendiri turun tangan untuk mengelola sampah agar sampah tak terus jadi masalah.		

## Gerakan Massa Solusi Atasi Sampah

Sampah menjadi masalah serius bagi kota jika tidak dikelola dengan baik. Saat ini, sebenarnya semua warga kota di Jabodetabek telah merasakan dampak buruk itu. Butuh warga sendiri turun tangan untuk mengelola sampah agar sampah tak terus jadi masalah.

Bantaran Kali Ciliwung di Kampung Sawah, Jagokaresa, Jakarta Selatan, bersih, rindang, dan rapi, Jumat (2/11/2018). Ada aneka tanaman bunga, buah, dan bambu di bantaran kali. Ada dermaga kecil yang sering dipakai untuk naik-turun perahu karet. Di tepi kali terdapat dua sawang kayu untuk sanggar dan sekolah alam Ciliwung. Kegiatan tersebut dikelola oleh komunitas Masyarakat Peduli Ciliwung (Mat Peci) sejak 2010 akhir.

Sebelum 2010, kawasan itu kumuh karena dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Gunung sampah di tepi kali kerap longsor ke sungai.

Komunitas Mat Peci, yang dipimpin Usman Firdaus, pelampungan memelihara lingkungan itu. Mereka mulai membersihkan sampah dan berdialog dengan warga. Mereka meyakinkan warga, Ciliwung adalah sumber kehidupan, bukan tempat sampah. Setelah dialog tahun, warga sadar dan enggan membuang sampah ke kali.

"Awalnya, kami kasih contoh. Kami membersihkan sampah karena di sini, kan, tempat bermain anak juga. Kalau berenang, agar anak-anak tidak terhalang sampah," ujar Usman, Jumat.

Menurut Usman, perlu konsistensi untuk mendampingi warga. Sekarang, ada sekitar enam anggota Mat Peci yang direkrut UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta



KOMPAS/TOTO WAJANTO

**Petugas** Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan alat berat membersihkan sampah yang hanyut di Kanal Barat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018). Memasuki musim hujan, pembersihan sungai dan saluran air terus digiatkan untuk meminimalkan terjadinya banjir.

dan resmi bertugas menjaga kebersihan lingkungannya sendiri.

Sukatma (34), mengatakan, karena berada di wilayah perhatian, tak jelas siapa yang membuang sampah ke kali. Ia pernah diajak Usman menelusuri Ciliwung dari Puncak. Ia kaget karena di hulu, di telaga Citamiang, banyak sampah dibuang ke kali, seperti di tempat-tempat wisata. Hingga ke hilir di Jakarta, perilaku membuang sampah ke kali terus terjadi.

### LabTanya

Di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Kampung Pondok Jaya, Pondok Aren, ada gerakan warga "Kota Tanpa Sampah" yang dipimpin arsitek muda Ignasius Susiadi Wibisono alias Adi. Sejak 2014, Adi mendirikan laboratorium masyarakat LabTa-

nya dengan program soal penanganan sampah.

Saat ditemui di Jakarta, Adi mengatakan, program itu dibuat dengan tujuan agar warga bisa mengelola sampah mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Di Pondok Jaya, misalnya, dulu banyak warga membakar sampah. Kini, warga tidak lagi membakar sampahnya.

Di Pondok Jaya, ada sekitar 200 keluarga yang aktif di LabTanya. Warga harus sadar asal muasal barang yang mereka konsumsi. Lalu baru muncul kesadaran mengurangi plastik. Ada satu warung kelenteng yang tidak melayani pembelian dengan plastik. Mereka memberikan opsi penggunaan wadah yang bisa dipakai kembali.

"Jika warga bisa memilah sampah organik, plastik, serta

mengurangi sampah pembalut, pepok, dan plastik, ini bisa mengurangi volume sampah hingga 20 persen," kata Adi.

Tinggal sebagian jenis sampah saja yang nanti tetap dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengolanya. Saat ini, sudah ada 18 komunitas warga di Kota Tangerang Selatan, Jakarta, dan Banjarmasin yang ikut program Kota Tanpa Sampah. Di Tangerang Selatan, program ini dilakukannya dengan program pemerintah daerah setempat.

Gerakan warga seperti Mat Peci ataupun LabTanya perlu terus digaungkan sehingga menjadi gerakan massa yang masif. Sebab, sekali lagi, sampah adalah masalah kita bersama.

(DIAN DEWI PURNAMASARI)

Judul	<b>Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Diperbanyak</b>	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 18)		
Resume	Pemerintah kebanjiran usul dari pemerintah daerah yang mengajukan agar daerahnya dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).Sudah ada tiga usul dari pemerintah daerah untuk mendaftar menjadi kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata.		

Pemerintah daerah berlomba-lomba agar wilayahnya dijadikan kawasan khusus.

Andi Ibnu

andi.ibnu@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah kebanjiran usul dari pemerintah daerah yang mengajukan agar daerahnya dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Sudah ada tiga usul dari pemerintah daerah untuk mendaftar menjadi kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata. "Usulan yang sedang dibicarakan ada tiga, di Pulau Bangka dan juga di Singasari," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, di Jakarta kemarin.

Sofyan mengatakan ketiga kawasan tersebut di antaranya dua kawasan di Pulau Bangka, yakni Tanjung Gunung dan Sungailiat. Adapun calon KEK Singasari merupakan usul dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dewan KEK, yang dikepalai Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, sedang mempersiapkan kelayakan dan kesiapan ketiga wilayah tersebut sebelum disahkan melalui persetujuan presiden.

Sektor pariwisata memang saat ini menjadi

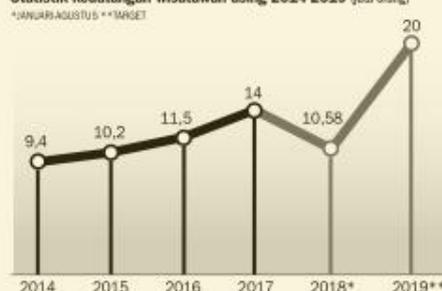
# Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Diperbanyak



## Target 20 Juta Wisatawan Asing

**SEKTOR** pariwisata ditargetkan mendatangkan devisa sebesar US\$ 20 miliar atau Rp 301,94 triliun tahun depan atau 20 juta wisatawan asing. Pembangunan destinasi baru pariwisata diperbanyak dan disebut. Saat ini pemerintah memiliki pekerjaan rumah membangun 10 wilayah "Bali baru".

Statistik kedatangan wisatawan asing 2014-2019 (juta orang)



## 10 "Bali baru"

1. Tanjung Lesung, Banten (Kawasan Ekonomi Khusus)
2. Mandalika, Nusa Tenggara Barat (Kawasan Ekonomi Khusus)
3. Morotai, Maluku Utara (Kawasan Ekonomi Khusus)
4. Tanjung Kelayang, Belitung (Kawasan Ekonomi Khusus)
5. Danau Toba, Sumatera Utara (Badan Otorita)
6. Candi Borobudur, Jawa Tengah (Badan Otorita)
7. Labuan Bajo, Maluku (Badan Otorita)
8. Bromo Tengger, Jawa Timur (Masih berproses)
9. Pulau Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Masih berproses)
10. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

man Djohan mengatakan usulnya belum digolkan lantaran ada pertimbangan tipe KEK yang bisa dijadikan opsi. Di wilayah calon KEK, kata Erzaldi, masih ada sejumlah area pertambangan timah yang dimiliki PT Timah dan perusahaan swasta lainnya. "Kemenko bilang pertambangan ini harus di-clearkan dulu. Kalau kami sih memang lebih condong ke pariwisata," kata Erzaldi.

Menurut dia, KEK pariwisata akan lebih baik ketimbang KEK industri ataupun pertambangan. Harga komoditas tambang seperti timah, kata dia, amat fluktuatif dan tidak pasti. Sedangkan dari sektor pariwisata KEK Tanjung Kelayang yang belum 100 persen selesai saja, Kabupaten Belitung sudah mendongkrak pendapatan asli daerah sebesar 43,7 persen dari Rp 130 miliar. "Pariwisata lebih pasti, belum resmi jadi KEK saja sudah ada minat investor bangun hotel."

Untuk mempercepat administrasi, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sedang mengurus perpindahan status jalan provinsi di kawasan menjadi jalan nasional. Duit pemerintah daerah juga digelontorkan sebesar Rp 300 miliar untuk memperbesar bandar udara lokal.

Kementerian Pariwisata mencatat sektor pariwisata Tanah Air menyumbang pendapatan hingga Rp 202,13 triliun pada tahun lalu. Pemerintah pusat bakal menampung semua usul destinasi pemerintah daerah untuk wilayah pariwisata baru secara serius. Pun pilihan pengelolaan bisa menjadi KEK pariwisata atau dijadikan badan otorita dengan opsi tambahan dikelola oleh BUMN Indonesia Tourism Development Corporation.

Direktur Utama ITDC Abdulbar Mansoer mengatakan, dalam pengelolaan KEK atau badan otorita, pemerintah bakal menjamin segala perizinan terpadu satu pintu plus berbagai insentif pajak pemanis investasi. "Kalau dibilang tiga jam selesai, paling terlambat jadi lima jam, tapi itu sudah lengkap semua," katanya. ITDC pun bakal didukung menjadi pengelola KEK Singasari.

Pembangunan berbagai kawasan khusus di seluruh penjuru Nusantara juga akan membuat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan Pulau Jawa sejak dulu berkontribusi paling besar dalam membentuk produk domestik bruto nasional. ● CAESAR ANWAR

Judul	<b>Pemerintah tidak ingin wariskan proyek mangkrak.</b>	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 14)		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan seluruh proyek yang mulai dijalankan pada periode pemerintahan kabinet kerja akan selesai dikerjakan.		

# Pemerintah tidak Ingin Wariskan Proyek Mangkrak

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono memastikan seluruh proyek yang mulai dijalankan pada periode pemerintahan Kabinet Kerja akan selesai dikerjakan.

Walaupun tidak semua pembangunan selesai pada 2019, ia mengatakan pada masa pemerintahan berikutnya, proyek-proyek yang telah dijalankan akan terus dilanjutkan.

Beberapa proyek yang mungkin belum rampung pada 2019 ialah bendungan dan jembatan yang dikerjakan dengan kontrak tahun jamak atau *multiyears*.

Sebagaimana diketahui, dari 49 bendungan yang dicanangkan, baru 2 yang terealisasi dan 8 lainnya akan menyusul beroperasi pada akhir 2018.

"Kami tidak mengejar 2019 semua harus selesai, tetapi kami pastikan tidak akan meninggalkan proyek-proyek yang ada, yang sudah dipasang pilar-pilarnya, itu tidak akan dibiarkan mangkrak," ungkap Basuki di kantornya, Jakarta, kemarin.

Dengan skema kontrak tahun jamak, menurut dia, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan meski diselingi pergantian pemerintahan. Hal itu bisa dilakukan karena semua proyek pembangunan sudah dibuatkan kontrak yang berkekuatan hukum.

"Kalau ada yang berani menghentikan, mereka akan bermasalah lantaran kontrak ini punya kekuatan hukum," tegas Basuki.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Hari Suprayogi menyatakan tahun ini pihaknya menargetkan melelang 14 bendungan. Hingga kini, 13 bendungan sudah dilelang dan menyisakan satu, yakni Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Hari, ada permasalahan sehingga bendungan itu belum bisa ditenderkan. "Masih ada masalah sosial. Kalau tidak tahun ini, ya tahun depan baru dilelang," ujar Hari.

Ia mengatakan beberapa penduduk di lokasi rencana pembangunan menolak pindah meski diberi uang ganti rugi. Kementerian PU-Pera pun menyiapkan alternatif lokasi pengganti.

"Akan tetapi, tokoh masyarakat di sekitar lokasi meminta pembangunan tetap jalan karena selama ini akses air sulit didapat," tutur Hari. (Pra/E-3)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 15)		
Resume	Pengembangan Kawasan Pesisir Timur Jambi. Bangunan pertokoan dan rumah penduduk memadati kawasan pesisir timur Provinsi Jambi di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, pekan lalu.		



ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN

**PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TIMUR JAMBI:** Bangunan pertokoan dan rumah penduduk memadati kawasan pesisir timur Provinsi Jambi di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, pekan lalu. Kuala Tungkal yang berjarak sekitar 120 dari Kota Jambi dan berada di pesisir timur provinsi itu merupakan kawasan pelabuhan terpadat di daerah itu yang terus dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan pariwisata.

Judul	Target Lelang 14 Bendungan Meleset	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian PUPR menyatakan target melelang 14 proyek bendungan pada tahun ini meleset seiring dengan pembatalan lelang Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur senilai Rp 550 miliar.		

# Target Lelang 14 Bendungan Meleset

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan target melelang 14 proyek bendungan pada tahun ini meleset seiring dengan pembatalan lelang Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur senilai Rp550 miliar.

Irene Agustine  
www.agustine@bisnis.com

Diren Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi mengatakan, pemerintah hanya melelang 13 proyek bendungan sepanjang tahun ini dan diharapkan seluruh tanda tangan kontrak dapat dilakukan sebelum tutup tahun.

Menurutnya, pembatalan lelang Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo pada tahun ini karena masih berpolemik dengan penolakan warga sekitar.

Dia melanjutkan, pihaknya belum bisa melakukan survei geoteknik untuk proyek ini karena sejumlah penduduk di sekitar rencana proyek menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Nanti kami coba tahun depan. Karena untuk menambak geoteknik bendungan itu belum bisa masuk saat ini," katanya di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jakarta, Senin (5/11).

Sebelumnya, lelang proyek Bendungan Digoel di Papua yang ditaksir memiliki kapasitas tampung 230 juta meter kubik juga batal dilakukan pada tahun ini karena desain pembangunan belum rampung.

Sebagai gantinya, pemerintah mengganti

► Proyek pembangunan Bendungan Mbay belum bisa dilanjutkan karena ada penolakan dari masyarakat sekitar.

► Pemerintah mengganti lelang proyek Bendungan Mbay dengan proyek pembangunan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat.

proyek tersebut dengan pembangunan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat karena dinilai lebih siap. Proyek Bendungan Meninting yang seharga Rp550 miliar sudah dimulai sejak tahun 2019 tersebut sudah memulai lelang pada September 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sebelumnya sudah memiliki rencana relokasi proyek Bendungan Mbay di provinsi yang sama. Namun, dia menjelaskan sejumlah tokoh masyarakat tetap meminta rencana pembangunan bendungan itu tetap dilanjutkan.

Alasannya, daerah tersebut memang termasuk wilayah kering yang membutuhkan tambahan sumber air baku. Dengan sikap itu, pemerintah tetap berupaya untuk membangun Bendungan Mbay kendati mundur dari rencana awal. "Kalau misalnya memang tidak bisa dibangun tahun ini, ya tahun depan," ujarnya.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), perkiraan anggaran pembangunan Bendungan Mbay mencapai Rp550 miliar dengan kapasitas tampung mencapai 24,91 juta meter kubik.

Proyek bendungan tersebut diharapkan bisa mengairi lahan seluas 5.206 hektare dan menyediakan pasokan air baku sebesar 0,54 meter kubik per detik.

Sepanjang tahun ini, pemerintah menargetkan dapat melelang 14 proyek bendungan yang terdiri atas 11 proyek bendungan tahun anggaran (TA) 2018 dan tiga carry over proyek bendungan 2017.

Dari total 13 lelang proyek bendungan yang sudah dilakukan pemerintah pada tahun ini, tiga proyek di antaranya kontraknya sudah ditandatangani dengan pemenang lelang.

## Membangun Bendungan Demi Ketahanan Pangan

Pembangunan bendungan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla selama 2015-2019 guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Selama kurun waktu tersebut, sebanyak 65 bendungan akan dibangun dan ditargetkan beroperasi seluruhnya paling lambat akhir 2023. Dari jumlah tersebut, 16 bendungan di antaranya merupakan proyek lanjutan tahun sebelumnya, sedangkan 49 proyek lainnya merupakan proyek baru.



Ketiga bendungan tersebut merupakan proyek carry over tahun lalu yakni Tiga Dihaji di Sumatra Selatan, Bener di Jawa Tengah dan Sidan di Bali.

Sementara itu, dua proyek lainnya sudah ditetapkan penerapannya dan menunggu tanda tangan kontrak, yakni Bendungan Jlantah dan Bendungan Randugunting di Jawa Tengah.

Delapan proyek lainnya masih dalam tahapan pelelangan yakni Sadawarna di Jawa Barat, Beringin Sila dan Meninting di NTB, Tamblang di Bali, Rukoh di Aceh, Tamblang di Jawa Timur, Manikin di NTT, dan Bulango Ulu di Gorontalo.

### SELESAI 2018

Adapun, Menteri PUPR memastikan sebanyak 8 proyek pembangunan akan rampung penyelesaiannya pada tahun ini, termasuk Bendungan Kuningan di Jawa Barat dan Passeloreng di Sulawesi Selatan yang sempat dikabarkan terganjal dengan upaya pembebasan lahan.

"Dari laporan sampai saat ini, delapan bendungan akan selesai sampai akhir tahun ini," ujarnya.

Selain Kuningan dan Passeloreng, enam

## Realisasi Lelang Proyek Bendungan 2018

Nama proyek	Lokasi (Rp miliar)	Nilai kontrak	Status
Tiga Dihaji	Sumatra Selatan	3.820	Sudah kontrak
Bener	Jawa Tengah	3.790	Sudah kontrak
Sidan	Bali	830	Sudah kontrak
Randugunting	Jawa Tengah	858,79	Menunggu kontrak
Jlantah	Jawa Tengah	965,20	Menunggu kontrak
Beringin Sila	Nusa Tenggara Barat	1.720	Proses lelang
Sadawarna	Jawa Barat	1.940	Proses lelang
Meninting	Nusa Tenggara Barat	1.419	Proses lelang
Tamblang	Bali	793,79	Proses lelang
Manikin	Nusa Tenggara Timur	1.990	Proses lelang
Bagong	Jawa Timur	2.310	Proses lelang
Rukoh	Aceh	1.574	Proses lelang
Bulango Ulu	Gorontalo	2.300	Proses lelang
Mbay	Nusa Tenggara Timur	-	Ditunda 2019

Sumber: LPSE, Kementerian PUPR, Bappenas, dilah

BSN/USU/PAKAPAT

bendungan lainnya yang ditargetkan rampung pada tahun ini yaitu Rotiklot di NTT, Mila di NTB, Gondang dan Legung di Jawa Tengah, Sei Gong di Batam, dan Sindang Heula di Banten. Progress keenam bendungan resata telah mencapai finalisasi akhir.

Sebelumnya, pemerintah membuka lelang konstruksi Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo senilai Rp2,3 triliun dengan memulai tahap pra-kualifikasi.

Dari laman Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek tersebut ditawarkan dalam dua paket pengerjaan.

Pada paket I, proyek yang ditawarkan senilai Rp1,28 triliun, sedangkan paket II Rp1,08 triliun. Kedua proyek menggunakan anggaran tahun jamaik atau *multiyears contract*.

Lelang proyek tersebut menggunakan metode kualifikasi pra-kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur. Kontraktor harus memiliki syarat kualifikasi dengan memiliki sertifikat badan usaha (SBU) klasifikasi bangunan sipil kode S301, memiliki izin usaha jasa konstruksi (IUJK), tanda daftar

perusahaan (TDP), dan telah melunas kewajiban pajak tahun terakhir.

Dengan dibukanya tahapan lelang proyek bendungan Bulango Ulu, pemerintah tinggi menyisakan lelang pembangunan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur, agar sesuai dengan rencana akhir tahun untuk melelang 14 proyek bendungan sepanjang tahun ini.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa proyek bendungan tersebut saat ini masih diproses pengajuan dokumen lelang dan akan segera menyusul untuk dilelang.

Jika berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pengumuman hasil pra-kualifikasi pengerjaan konstruksi Bendungan Bulango Ulu akan diketahui pada 19 November 2018, penetapan pemenang pada 3 Desember 2018, dan tanda tangan kontrak pada 21 Desember 2018.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, bendungan didesain dengan tinggi 74 meter dari dasar galian pondasi, panjang bendungan 345 meter, dengan volume tampungan dihitung dari muka air normal sebanyak 84 juta m<sup>3</sup>.

Judul	Jembatan Batam-Bintan Telan Rp 11 Triliun	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Perkiraan investasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 3 km melonjak menjadi Rp 11 triliun dalam dokumen perencanaan terbaru yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian PUPR.		

# Jembatan Batam-Bintan Telan Rp11 Triliun

JAKARTA — Perkiraan investasi pembangunan Jembatan Batam—Bintan sepanjang 3 km melonjak menjadi Rp11 triliun dalam dokumen perencanaan terbaru yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebelumnya, proyek yang direncanakan dibangun pada 2007 tersebut diperkirakan hanya memiliki biaya investasi pada kisaran Rp7 triliun. Setelah sempat berhenti, akhirnya usulan pembangunan untuk konektivitas dua pulau tersebut bergulir kembali.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan setelah melakukan pembahasan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, pemerintah pusat menyetujui usulan pembangunan jembatan bentang panjang tersebut karena memang dibutuhkan untuk mobilitas dan pengembangan kawasan kedua pulau.

Saat ini, dokumen perencanaan tersebut tengah dievaluasi di Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR, mulai dari rencana desain sampai dengan biaya pembangunannya.

“Keputusannya iya akan dibangun. Namun kami akan lihat dulu desainnya, dikaji dulu bagaimana kesesuaiannya *cost*-nya, mungkin bisa berubah,” katanya di Jakarta, Senin (5/11).

Selain itu, Basuki mengatakan skema pembiayaan dan bentuk pembangunan juga akan dievaluasi. Menurutnya, proyek tersebut bisa saja masuk dalam rencana proyek pemerintah (*solicited project*) atau juga dikerjasamakan dengan swasta lewat Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Saat ini, dia mengatakan beberapa pihak swasta juga sudah menunjukkan ketertarikannya. “Termasuk dengan skema *financing*-nya akan kami evaluasi dulu, ada memang swasta yang berminat.”

Berdasarkan catatan *Bisnis*, salah satu swasta yang sudah mengutarakan minat untuk menjadi calon investor proyek tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dirjen Bina Marga Sugiyartanto menambahkan, desain teknis rencana pembangunan tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk dipastikan keamanan desain pembangunannya. (*Irene Agustine*)

Judul	<b>Babel Perjuangkan KEK Pariwisata</b>	Tanggal	Selasa, 6 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 22)		
Resume	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menginginkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung gunung dan Sungailiat diubah peruntukannya dari tambang menjadi pariwisata.		

# Babel Perjuangkan KEK Pariwisata

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menginginkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Gunung dan Sungailiat diubah peruntukannya dari tambang menjadi pariwisata.

Gubernur Babel Erzaldi Rosmam Djohan mengatakan, pemprov menginginkan Tanjung Gunung menjadi KEK pariwisata. Hanya saja, keberadaan tambang di sana mengharuskan pemerintah mengubah aturan zonasi.

“Masih ada catatan kecil berkenaan dengan tambang di sekitar daerah yang akan ditetapkan [sebagai] kawasan pariwisata ini,” katanya, Senin (5/11).

Dia menjelaskan, pariwisata di Tanjung Gunung dan Sungailiat tumbuh pesat. Hal itu terefleksi dari jumlah kunjungan turis pada 2017 yang mencapai 6.417 wisatawan asing dan 324.189 wisatawan nusantara, naik 24,9% secara total dari tahun sebelumnya.

Selain itu, katanya, Provinsi Babel memiliki 555 pulau dan baru 50 di antaranya yang berpenghuni. Artinya, investasi pariwisata akan lebih berdampak besar pada perekonomian daerah.

Bahkan, sudah ada korporasi yang

tertarik berinvestasi, seperti InterContinental Hotels Group dan PT Dyandra Media International Tbk., yang berencana mengembangkan bisnis MICE.

Erzaldi mengungkapkan, pembicaraan KEK di kedua kawasan itu masih belum menemukan titik terang. Pasalnya, selain harus merundingkannya di rapat paripurna, pemerintah harus berunding internal dengan PT Timah (Persero) Tbk. dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, permasalahan lahan masih menjadi kendala dalam penentuan status KEK Tanjung Gunung dan Sungailiat. Namun, pemerintah menargetkan permasalahan tersebut tuntas dalam 1 bulan, sehingga proyek KEK sudah dapat berjalan sebelum 2019.

Enoh menjelaskan, pemerintah memiliki visi yang sama dengan Pemprov Babel, yakni memperkecil kontribusi tambang dalam pendapatan asli daerah. Menurutnya, dua lokasi di Babel tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp10 triliun—Rp15 triliun untuk pengembangannya. *(M. Richard)*